BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting untuk segera ditangani, mengingat volume sampah yang dihasilkan disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Kondisi sampah nasional semakin hari kian meningkat, hal tersebut dapat terjadi karena seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, industri, gaya hidup dan aktivitas ekonomi yang menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan volume sampah. Pada Tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa sampah yang dihasilkan dari 287 kabupaten dan kota di Seluruh Wilayah Indonesia sebanyak 31,3 juta ton/tahun, dengan detail pengelompokan sampah; 18,7 juta ton sampah terkelola dengan baik, sedangkan 12,6 juta ton sampah yang belum dapat terkelola dengan baik (KLHK 2024). Dari data tersebut pengelolaan sampah nasional hingga saat ini harus lebih ditingkatkan, hingga seluruh sampah dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah timbulnya limbah sampah yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

Masalah sampah di Kabupaten Banyuwangi semakin hari dirasa semakin meningkat, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Pada Tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi diketahui menghasilkan volume sampah sebanyak 306,270.96 ton/tahun (KLHK 2024). Angka tersebut masih tergolong tinggi yang menjadi sebuah peringatan untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi supaya lebih cepat, tepat dan dapat menjangkau seluruh sampah agar terkelola dengan baik dan mencegah timbulnya limbah sampah yang lebih banyak (Restiawan & Agriesta, 2022). Selain masyarakat yang harus peduli dengan kebersihan lingkungan, pemerintahan juga harus membuat mengoptimalkan kebijakan dalam pengelolaan sampah.

Regulasi atau peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi telah ada yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 54 tahun 2018, Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Bupati Banyuwangi 2018). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2022). Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2023). Ketiga regulasi tentang pengelolaan sampah menegaskan bahwa penanganan dan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi fokus utama bagi pemerintah. Tingginya angka sampah nasional, merupakan hasil kiriman sampah dari seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, untuk mengurangi volume sampah nasional harus dimulai dari daerah untuk daerah sendiri. Ketika volume sampah di daerah sudah menurun maka secara otomatis angka sampah nasional akan mengalami penurunan.

Permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Banyuwangi menjadi fokus pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi mengkonfirmasi bahwa tingginya sampah yang ada di Banyuwangi disebabkan oleh salah satunya masyarakat yang belum mampu mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan juga masyarakat masih membuang sampah di sungai. Fakta yang membuktikan bahwa pernyataan tersebut memang benar adanya. Dibuktikan dengan banyaknya popok bayi sekali pakai yang berada di bantaran sungai, sampah rumah tangga dan plastik lainnya yang juga masih belum terkelola dengan baik. Dinas juga pernah mendapatkan laporan mengenai adanya oknum yang tidak bertanggungjawab membuang tumpukan sampah yang lumayan banyak di jalanan pasar Banyuwangi. Hal tersebut menyebabkan area pasar yang sebelumnya bersih menjadi kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap dari tumpukan sampah tersebut. Beruntungnya ada warga yang melapor sehingga sampah tersebut segera diatasi oleh dinas (Manunggal, 2024). Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk mendorong dan mengoptimalkan peran masyarakat serta pemerintah desa melalui Program Banyuwangi Hijau (BWH), sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Banyuwangi.

Program Banyuwangi Hijau (BWH) memberikan peran yang sangat besar dalam upaya pemerintah untuk menangani masalah sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan pengelolaan persampahan TPS 3R (Tempat Pemrosesan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga dapat mengurangi volume sampah di TPA. BWH mendorong kertilabatan dari multi-pihak untuk meningkatkan penyediaan layanan persampahan yang terintegrasi dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (BWH, 2022). Sampah di Kabupaten Banyuwangi menjadi sebuah persoalan yang harus segera ditangani agar tidak merusak kesehatan lingkungan dan manusia. Kabupaten Banyuwangi bukan termasuk kedalam 10 kabupaten/kota sebagai penghasil sampah terbesar di Provinsi Jawa Timur (databoks, 2022). Namun hal tersebut tidak menjadikan sampah sebagai hal yang di remehkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program pengelolaan sampah tetap menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga Kabupaten Banyuwangi memiliki peluang besar dan lebih cepat daripada kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan Banyuwangi *Zero waste* (gaya hidup bebas sampah). Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Banyuwangi hijau sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah agar program tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Meskipun Program Banyuwangi Hijau telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, namun masih terdapat beberapa permasalahan spesifik yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, dimana tidak semua masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat kendala dalam infrastruktur pengelolaan sampah, hal tersebut dapat terlihat dalam pengambilan sampah yang dijadwalkan beberapa kali tidak sesuai dengan jadwal, sehingga menyebabkan penumpukan limbah dan bau yang tidak sedap di lingkungan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dan program telah dilaksanakan, dalam pengimplementasiannya masih menghadapi beberapa hambatan yang memerlukan perhatian yang lebih lanjut lagi. Oleh sebab itu,

evaluasi mendalam terhadap Program Banyuwangi Hijau ini sangat penting untuk mengidentifikasi akar dari permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga Program Banyuwangi Hijau (BWH) dapat berjalan secara optimal dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Karangsari merupakan desa wilayah administrasi yang berada di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya Desa Karangsari merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Genteng yang kemudian mengalami perpecahan untuk perluasan wilayah dan menjado bagian dari Kecamatan Sempu. Di Desa Karangsari terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, salah satunya yaitu permasalahan sampah yang tak kunjung usai. Hal tersebut dikarenakan beberapa masyarakat Dusun Nganjukan masih membuang sampah di sungai dan juga dibakar. Permasalahan sampah yang belum terselesaikan ini memiliki berbagai macam faktor, diantaranya kurangnya partisipasi dari masyarakat, infrastruktur kurang memadai, belum menemukan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pembayaran iuran pengelolaan sampah, dan juga pengambilan sampah yang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah dalam mewujudkan program Banyuwangi Hijau (BWH) di Desa Karangsari Kecamatan Sempu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah dalam mewujudkan program Banyuwangi Hijau (BWH) di Desa Karangsari Kecamatan Sempu dalam memperkuat dan memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah, serta mendukung kesuksesan program Banyuwangi Hijau secara lebih luas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu secara normatif diantaranya:

1. Manfaat Praktis, Secara umum penelitian ini memberikan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Karangsari mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah dalam mewujudkan program Banyuwangi Hijau (BWH) di Desa Karangsari Kecamatan Sempu. Secara khusus, penelitian ini memberikan masukan yang konstruktif kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang sedang diterapkan, supaya membantu dalam merumuskan kebijakan dan membuat program yang lebih efektif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang literasi ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan, dengan menambah pemahaman mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Karangsari Kecamatan Sempu. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan responsive untuk Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Sempu.